

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah suatu instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan aspek pendapatan yang meliputi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Non Pajak Kendaraan Bermotor. PPPD ini berada di bawah pengawasan BAPENDA (Badan Pemerintahan Pendapatan Daerah) yang telah diatur dalam Peraturan Provinsi Jawa Barat No,174. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang pengelolaan memiliki beberapa fungsi sebagai penyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan bidang pengelolaan pendapatan, pengelenggarakan pengelolaan dan fasilitasi pendapatan, penyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 2.1 Logo PPPD

Nama Instansi : Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung Barat
Alamat Instansi : Jalan Raya Cimareme No. 203 Padalarang, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat 40552

2.1.1 Sejarah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten

Bandung Barat

Badan Pendapatan Daerah berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) Oleh karenanya penting komitmen kedinasan menjadi satu masa lalu yang dilalui pada OPD lain sebagai referensi penguat, sebagai referensi pembanding, tapi ketika menjadi bagian aparatur Dispenda harus memiliki esprit de corps kuat terhadap organisasi melalui pengungkapan sejarah dipandang langkah tepat karena sejarah bisa menjadi modal dalam mengilhami serta inspirasi kedepan.\

Berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 219/Po/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebelum itu dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 60/PO/V/OM/SK/71 sudah dibentuk suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupakan embrio semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub ordinat dari administratur bidang keuangan.

Pada awalnya susunan organisasi jawatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu kepala jabatan dan unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian, kepala sub bagian dan kepala Staff Seksi. Sebagai Kepala Jawatan yang pertama yaitu Drs. H. MAHBUB MESRIE dengan periode jabatan dari tahun 1972 – 1976. Sebagai unsur pelaksana adalah kantor-kantor perwakilan jawatan ditingkat Inspektorat Wilayah yang terdiri dari:

1. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Banten disebut wilayah I yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.
2. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Bogor disebut wilayah II yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.
3. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Cirebon disebut wilayah III yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.

4. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Purwakarta disebut wilayah IV yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.
5. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Priangan disebut wilayah V yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.

Sebagai konsekwensi berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka sebutan atau nomenklatur kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 nomenklatur jawatan diUbah Data dengan Dinas Perpadjakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Setelah berubah Data nama menjadi Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Djawa Barat dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Perda Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 7/DP.040/PD/78 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat.

Selanjutnya dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 7/DP.040/PD/78 Tanggal: 30 Agustus 1978 Tentang; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat. Berdasarkan susunan organisasi ini, eksistensi kantor-kantor perwakilan jawatan di setiap wilayah ditiadakan sehingga organisasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan adalah kepala dinas;
2. Unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian tata usaha;
3. Unsur pelaksana adalah sub dinas, cabang dinas dan unit pelaksana teknis

Pada saat perundangan di bidang pajak dan retribusi daerah disempurnakan dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubah Dataan Atas UU Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan jenis pajak baru yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan kembalinya pajak pengambilan air menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dalam kerangka mengantisipasi tugas-

tugas berat tersebut dengan penyelenggaraan ekonomi di bidang pendapatan daerah, maka dilakukan penyempurnaan kelembagaan dinas dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana pada level operasional diperkuat dengan 31 (tiga puluh satu) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD).

Pada tahun 2005-2008, kepemimpinan dinas pendapatan dipegang oleh Drs. H. WAHYU KURNIA, MBA. Pada era ini aktifitas yang menonjol dalam bentuk *capacity building* pegawai melalui program strata 1 dan 2 di Universitas Winaya Mukti. Upaya ini suatu *new human first man* investasi, disamping peningkatan kompetensi diri dalam menjalankan karir kedinasan, insya Allah dapat dimanfaatkan setelah memasuki masa purna bakti, seperti menjadi masyarakat profesional maupun akademisi.

Selanjutnya oleh Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, pada tahun 2008 ditetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat defenitif yakni Drs. H. SUTRISNO, dengan garis-garis kebijakan diletakkan pada keseimbangan capaian kinerja pendapatan dan kinerja pelayanan. Didalam periode ini dibangun rumah masa depan Dinas Pendapatan dengan struktur organisasi yang berdasarkan Perda no. 21 tahun 2008 tanggal : 19 november 2008 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam kerangka pencapaian keseimbangan pendapatan dan pelayanan, agenda-agenda yang dikedepankan berkaitan dengan Drive Thru, SAMSAT online, Gerai SAMSAT atau banking system, layanannya SMS dan SAMSAT Mobile.

Kepemimpinan berikutnya, pada tahun 2009 Kepala Dinas Pendapatan dijabat oleh Drs. Bambang Heryanto, M.Si, dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Samsat kepada masyarakat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2009 tentang Keringanan dan atau Pembebasan Pokok Pajak serta Sanksi Staff Subbagian Tata Usahaistrasi PKB dan BBNKB, akan dilaksanakan operasional terpadu di seluruh Jawa Barat yang bekerja sama dengan Polda Jabar, Polda Metro dan PT. (Persero) Jasa Raharja dengan pola operasional melibatkan kecamatan, kelurahan dan polisi sektor, serta memberikan stimulus fiskal berupa keringanan pokok pajak dalam batas tertentu dan sanksi administrasi atas pembayaran PKB/BBNKB serta keringanan jasa raharja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang kemungkinan akan diikuti provinsi lain.

Pada masa inilah banyak dilahirkan berbagai macam Inovasi Pelayanan Samsat yang melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, antara lain Inovasi E-Samsat Jabar, T-Samsat, Sistem Informasi Pajak Online dan Samsat Masuk Desa.

Kemajuan dalam Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan banyak diapresiasi oleh berbagai pihak, bahkan Inovasi E-Samsat Jabar dijadikan sebagai Pilot Project Pelayanan Publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk direplikasi ke 17 Provinsi lainnya di Indonesia.

Setelah selama 45 tahun berkiprah di Provinsi Jawa Barat, terhitung tanggal 3 Januari 2017 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.

2.1.2 Fungsi dan Tugas Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah

Kabupaten Bandung Barat

Fungsi Bidang Pendapatan sebagaimana yang telah diatur dalam **Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 174 Tahun 2021**, Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan, meliputi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Non Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam menyelenggarakan tugas poko, Bidang Pengelolaan Pendapatan, mempunyai fungsi:

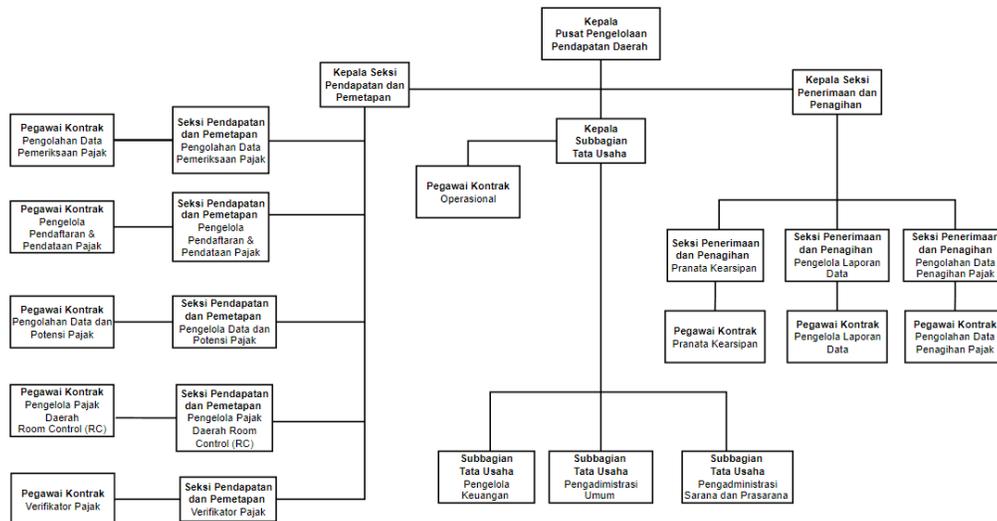
1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan;
2. penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi pendapatan;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Pendapatan;
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan, meliputi:

1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Pendapatan;
2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
3. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
4. menyelenggarakan koordinasi pelayanan pemungutan pendapatan daerah;
5. menyelenggarakan perhitungan tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
6. menyelenggarakan koordinasi pelayanan pemungutan pendapatan daerah;
7. menyelenggarakan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak serta wajib pungut;
8. menyelenggarakan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib retribusi dan objek retribusi daerah;
9. menyelenggarakan koordinasi penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
10. menyelenggarakan koordinasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
11. menyelenggarakan penatausahaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
12. menyelenggarakan bahan kebijakan pengHapus Dataan, keringanan dan restitusi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
13. menyelenggarakan bahan kebijakan pengHapus Dataan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

14. menyelenggarakan koordinasi penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
15. menyelenggarakan koordinasi konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
16. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan terhadap Perangkat Daerah Penghasil/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
17. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan;
18. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
19. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendapatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
20. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Pendapatan;
21. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
22. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Pendapatan;
dan
23. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung Barat



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PPPD

Struktur organisasi ini merupakan struktur resmi yang digunakan pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

2.1.4 Deskripsi Jabatan

1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sebagaimana yang telah diatur dalam **Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 174 Tahun 2021** mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Fungsi dari Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Rincian Tugas Kepala Badan:

1. menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi pendapatan serta pengelolaan sistem informasi pendapatan dan UPTD;
2. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri bidang keuangan aspek pendapatan daerah;
3. menyelenggarakan monitoring, pengendalian dan evaluasi teknis pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang keuangan aspek pendapatan daerah;
4. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
5. menyelenggarakan perumusan dokumen perencanaan dan pelaporan Badan.

2. Tugas dan Fungsi Subbagian

Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana yang telah diatur dalam **Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 174 Tahun 2022**, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi keuangan dan aset, meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan dan aset, mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan teknis serta koordinasi di bidang keuangan dan aset
2. pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Subbagian meliputi:

1. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
2. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
3. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
4. melaksanakan penatausahaan pendapatan, belanja dan aset Badan;
5. melaksanakan verifikasi administrasi pendapatan dan belanja Badan;
6. melaksanakan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja Badan;
7. melaksanakan analisis kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset Badan serta sistem akuntansi Badan;
8. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Subbagian;
9. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Keuangan;
10. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Badan;
11. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
12. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan;
14. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3. Tugas dan Fungsi Penagihan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas-tugas penagihan dan pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Tanah dan melakukan koordinasi serta pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Sewa Tanah.

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien,
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas,
4. menyetujui pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
5. merumuskan rencana program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
6. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi sewa tanah,
7. melaksanakan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi sewa tanah,
8. melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pajak daerah dan retribusi sewa tanah,
9. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Sewa Tanah,
10. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan,
11. melaksanakan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan yang dikelola Badan,
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang,

13. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 14. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Tugas dan Fungsi Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi sewa tanah.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien,
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas,
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan,
5. melakukan penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi sewa tanah,
6. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, penghitungan, penilaian dan penetapan pendapatan yang dikelola oleh Badan serta memproses pengurangan, keberatan, kelebihan dan keringanan;
7. mengkoordinasikan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Sewa Tanah,
8. melakukan penelitian terhadap SPTPD dan kelengkapan SPTPD,

9. mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan, pendaftaran, penghitungan, penilaian dan penetapan pendapatan yang dikelola oleh Badan serta hasil proses pengurangan, keberatan, kelebihan dan keringanan;
10. menyusun data potensi Pajak Daerah,
11. mengelola sistem informasi teknologi pendapatan asli daerah,
12. memelihara dan mengembangkan aplikasi online pajak daerah,
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang,
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja,
15. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Tugas dan Fungsi Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian RSUD.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha berdasarkan program RSUD,
2. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumahtangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan,
3. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pension, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja

pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai,

4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran,
5. Penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan,
6. Pelaksanaan ketatausahaan keuangan,
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan.
8. Penyiapan bahan administrasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD,
9. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan,
10. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan, serta pengamanan perlengkapan dan aset,
11. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris,
12. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan Data serta penatausahaan barang milik daerah,
13. Pengekoordinasian penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur,
14. Penyiapan bahan survei kepuasan masyarakat,
15. Pelayanan pengaduan masyarakat,
16. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja,
17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian tata usaha, dan
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori pada penulisan penelitian ini akan menjelaskan teori-teori yang dipakai dan berhubungan dengan judul penulisan penelitian ini.

2.2.1 Sistem

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Selain itu pengertian yang lain, sistem terdiri dari unsur-unsur dan masukan (*input*), pengolahan (*processing*) serta keluaran (*output*). Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Sistem didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pemrosesan informasi [4].

2.2.2 Informasi

Informasi adalah hasil data yang diolah dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi merupakan sumber dasar bagi esensial dan organisasi agar manajemen dan operasionalisasi berfungsi secara efektif. Secara sederhana sistem informasi merupakan sarana yang dapat mengantarkan informasi dan menkoordinasikan segenap aspek kebutuhan pegawai dengan cara informasi yang didapatkan harus tersusun dengan baik agar dapat membantu menyajikan data yang akurat, cepat dan tepat waktu [5].

2.2.3 Manajemen

Manajemen adalah ilmu yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Secara universal pengertian manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang lebih tinggi. Manajemen memiliki tugas untuk melaksanakan semua kegiatan yang dibebankan organisasi. Maka dari itu, manajemen akan terjadilah pembagian tugas oleh pemimpin kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi yang akan meliputi pula pengawasan agar proses organisasi berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan [5].

2.2.4 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) bertujuan agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan sebuah keputusan sehingga SIM adalah suatu sistem yang menyediakan informasi kepada pengelola bisnis yang akan berguna dan dapat menunjang pelaksanaan tugas suatu organisasi. SIM dapat didefinisikan sebagai jaringan yang tersistematis dalam pengolahan data dan pengelolaan agar menghasilkan informasi untuk diberikan kepada pihak manajemen setiap waktu sebagai dasar pembuatan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi [5].

2.2.5 Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian kinerja pegawai adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen yang selama ini telah melakukan pekerjaannya yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengobservasi, mengukur, mendata serta dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan dari pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar lebih baik dan meningkatkan performa kerja pegawai [6].

2.2.6 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan menganalisis data, informasi, dan model matematis. Tujuan dari SPK adalah menyediakan alat atau metode yang dapat membantu individu atau tim dalam mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

SPK memanfaatkan teknik-teknik pengambilan keputusan, analisis data, dan pengolahan informasi untuk memberikan rekomendasi atau solusi yang lebih baik secara objektif. Sistem ini dapat menggunakan data historis, parameter yang diinputkan pengguna, serta berbagai metode analisis seperti pemodelan matematis, simulasi, penggalian data (data mining), atau logika fuzzy. SPK membantu meningkatkan keakuratan dan efisiensi pengambilan keputusan, serta mengurangi kecenderungan kesalahan manusia dan subjektivitas [7].

2.2.7 Metode *Plan-Do-Check-Act* (PDCA)

PDCA merupakan singkatan dari Plan-Do-Check-Act adalah metode pengendalian mutu yang diperkenalkan oleh Dr. W. Edwards Deming, yang sangat sesuai untuk diterapkan dalam skala kecil untuk meningkatkan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi durasi siklus kerja dan mengurangi pemborosan produktivitas di Perusahaan [8]. PDCA merupakan suatu metode siklus untuk perbaikan berkelanjutan yang digunakan dalam manajemen kualitas dan manajemen proses. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap langkah dalam konsep PDCA [9]:

1. Plan (Rencana), Tahap ini melibatkan perencanaan dan penentuan tujuan yang ingin dicapai. Identifikasi masalah atau peluang perbaikan, perumusan rencana, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Do (Lakukan), Tahap ini melibatkan implementasi rencana yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan. Tindakan nyata dilakukan untuk menerapkan perubahan atau pemecahan masalah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Check (Periksa), Tahap ini melibatkan evaluasi dan pengumpulan data untuk mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Perbandingan hasil dengan tujuan yang ditetapkan, identifikasi perbedaan, dan analisis data untuk menentukan apakah tindakan telah berhasil.
4. Act (Tindakan), Tahap ini melibatkan tindakan berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya. Jika hasil memenuhi tujuan yang ditetapkan, tindakan yang efektif dapat dipertahankan dan disempurnakan. Jika terdapat perbedaan atau kesalahan, tindakan perbaikan diterapkan untuk memperbaiki masalah.

2.2.8 MySQL

MySQL adalah nama database server yang berfungsi untuk menangani database. Database ini bertujuan untuk memudahkan penyimpanan dan akses data secara terorganisir. MySQL tergolong sebagai database

relasional. Pada model ini, data dinyatakan dalam bentuk dua dimensi yakni secara khusus dinamakan tabel yang terdiri dari baris dan kolom [10].

2.2.9 Hypertext Preprocessor (PHP)

Hypertext Preprocessor atau PHP adalah salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Bahasa pemrograman ini bisa berjalan disisi server atau biasa disebut dengan *Side Server Language*. Jadi, Bahasa pemrograman ini tidak dapat berjalan kecuali ada yang menjalankannya pada server web, tanpa adanya server web yang terus berjalan maka tidak dapat dijalankan [10].

2.2.10 Metode *Weighted Product*

Metode *Weighted Product* (WP) adalah sebuah metode didalam penentuan sebuah keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan *rating attribute*, dimana *rating* setiap *attribute* harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot *attribute* yang bersangkutan [11][3], [12]. Setiap pilihan keputusan dibandingkan satu sama lain dengan mengalikan serangkaian rasio, satu rasio untuk setiap kriteria keputusan. Setiap rasio ini ditingkatkan ke kekuasaan yang setara dengan bobot relatif dari kriteria yang relevan [13].

Adapun langkah-langkah penyelesaian dalam menggunakan metode WP sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan,
2. Menentukan *rating* kecocokan setiap alternatif dan menentukan bobot preferensi pada setiap kriteria,
3. Menentukan Nilai Vektor S, dengan rumus :

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{w_j}$$

Dengan keterangan:

- S : menyatakan pregerensi alternatif yang dianalogikan sebagai Vektor S
- x : menyatakan nilai kinerja
- w: menyatakan bobot kriteria
- I : menyatakan alternatif
- j : menyatakan banyaknya kriteria

4. Menentukan Nilai Vektor V, dengan rumus:

$$V_i = \frac{\prod_{j=1}^n X_{ij}^{w_j}}{\prod_{j=1}^n (X_j)^{w_j}}$$

Dengan Keterangan :

- V: menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai Vektor V
- x : menyatakan nilai kriteria
- w: menyatakan bobot kriteria
- I : menyatakan alternatif
- j : menyatakan kriteria

Atau juga dapat disederhanakan menjadi:

$$V_i = \frac{S_i}{S_1 + S_2 + \dots + S_n}$$

2.2.11 Pengujian Black Box

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berjalan dan berfungsi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi. Pengujian ini diuji dengan cara mencoba program yang telah dibuat dengan memasukan data pada setiap formulir tanpa harus memperhatikan detail software [14].

2.2.12 Business Process Modelling Notation (BPMN)

Business Process Modelling Notation atau disingkat menjadi BPMN adalah BPMN adalah standar notasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. BPMN digunakan untuk

menggambarkan aliran kerja, aktivitas, keputusan, percabangan, penyimpanan data, dan interaksi antara entitas dalam suatu proses bisnis. Dengan menggunakan BPMN dapat menggambarkan secara visual bagaimana proses bisnis bekerja, siapa yang terlibat, dan bagaimana informasi mengalir di antara mereka. BPMN adalah alat yang populer dalam analisis, perancangan, dan dokumentasi proses bisnis. Diagram BPMN membantu tim bisnis dan pengembang sistem untuk berkomunikasi dengan jelas dan secara efektif mengenai proses bisnis yang sedang dianalisis atau ditingkatkan [15].

2.2.13 Entity Relationship Model (ERD)

Entity Relationship Model atau disingkat menjadi ERD adalah salah satu alat yang digunakan dalam desain basis data untuk menggambarkan hubungan antara entitas (objek) dalam suatu sistem. ERD menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas.

ERD sering digunakan dalam pengembangan sistem database sebagai panduan visual untuk memahami struktur data dan hubungannya. Diagram ini membantu menggambarkan bagaimana entitas berinteraksi satu sama lain, menggambarkan atribut-atribut mereka, serta menunjukkan kardinalitas hubungan antara entitas tersebut [16].

2.2.14 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram atau disingkat menjadi DFD adalah singkatan dari Data Flow Diagram (Diagram Aliran Data). DFD adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data di dalam suatu sistem informasi. DFD menggambarkan bagaimana data diproses, disimpan, dan bergerak melalui berbagai komponen sistem.

DFD menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan entitas penghasil data (seperti pengguna atau sistem eksternal), proses-proses yang memanipulasi data, penyimpanan data, dan aliran data antara entitas dan proses. DFD membantu dalam memahami dan menganalisis sistem secara keseluruhan, memvisualisasikan bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan dihasilkan. DFD biasanya terdiri dari beberapa tingkat, mulai dari tingkat tinggi yang lebih abstrak

hingga tingkat terperinci yang lebih rinci. Setiap tingkat DFD memberikan pandangan yang berbeda tentang sistem dan membantu dalam pemodelan, analisis, dan dokumentasi proses bisnis atau sistem informasi [16].

2.2.15 *State of Art*

State of Art merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan konsep penelitian yang dilakukan yang dapat dijadikan sebuah acuan atau ide dalam penelitian. Berikut adalah hasil tinjauan literatur yang didapatkan melalui beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 State of Art

Review Literatur Pertama	
Judul Artikel	Sistem Penunjang Keputusan Penilaian Kinerja Kasir Lotte Mart Menggunakan Metode Weighted Product[11]
Penulis	Mirawati, Agung Baitul Hikmah, Wildan Wiguna
Judul Jurnal/ Proceeding	IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) Vol.3, No.2, November 2018, pp. 186~196 p-ISSN: 2527-449X, e-ISSN: 2549-7421
Tahun Penerbitan	2018
Masalah Utama yang Diangkat	Masalah yang diangkat penulis adalah di Pada PT Lotte Mart Indonesia. Pihak personalia mengalami kendala dalam melakukan penilaian kinerja kasir menggunakan kriteria penilaian yang diinginkan. Proses penilaian kinerja masih menggunakan formulir dalam bentuk excel, sehingga cara tersebut tidak cukup efektif yang menyebabkan belum tepatnya penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Kontribusi Penulis	Membangun sebuah sistem pendukung keputusan sebagai solusi ketidak efektifan penilaian kinerja dengan metode <i>Weighted Product</i>
Ikhtisar Artikel	Pada PT Lotte Mart Indonesia dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam melakukan penelitian. Salah satunya yaitu dalam melakukan penilaian kinerja terhadap kasir. Hal ini diangkat dikarenakan cara penilaiannya menggunakan <i>excel</i> sehingga tahapan penilaian kinerja kasir tidak cukup efektif sehingga proses pengambilan keputusan penilaian kinerja terhadap kasir masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan dengan menggunakan metode <i>Weighted Product (WP)</i> .
Hasil Penelitian, Kesimpulan	Sistem Penunjang Keputusan yang dikembangkan dalam penelitian ini memberikan kemudahan dalam mengelola data penilaian kinerja kasir dengan menggunakan pemrograman website berbasis objek sehingga sistem tersebut dapat mempercepat pengelolaan data nilai kinerja kasir dengan memimplementasikan metode WP pada sistem untuk menghitung peringkat dari kinerja kasir pada PT Lotte Mart Indonesia.

Review Literatur Kedua

Judul Artikel	Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Pramuniaga Toserba Yogya Ciwalk Menggunakan Metode <i>Weighted Product</i> [3]
---------------	--

Penulis	Phitsa Maulina, Wildan Wiguna, Dimas Widyaman
Judul Jurnal/ Proceeding	Jurnal Infotronik Volume 3, No. 2, Desember 2018 p-ISSN : 2548-1932 e-ISSN : 2549-7758
Tahun Penerbitan	2018
Masalah Utama yang Diangkat	Masalah yang diangkat berfokus pada proses evaluasi kinerja parmuniaga di Toserba Yogya Ciwalk untuk melengkapi pembuatan perangkat lunak atau aplikasi sistem pendukung keputusan karena manajemen kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja yang masih menggunakan formulir kertas sehingga banyak data yang tercecer dan belum adanya suatu metode yang tepat dalam memproses penilaian. Maka penulis menggunakan metode <i>Weight Product</i> sebagai solusi yang diajukan pada kasus yang di teliti ini
Kontribusi Penulis	Membangun dan melengkapi pembuatan perangkat lunak atau aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pada Toserva Yogya Ciwalk
Ikhtisar Artikel	Dalam mengambil keputusan, tempat yang diteliti terdapat beberapa kendala hasil obserbvasi yang salah satunya dalam mengevaluasi kinerja Pramuniaga. Pihak manajemen kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja pramuniaga yang masih menggunakan formulir kertas dan penilaian tersebut belum memiliki suatu metode yang dapat mendukung sebuah keputusan. Maka dari itu penulis mengajukan sebuah metode yang dapat menghasilkan sebuah

	keputusan yaitu metode <i>Weight Product</i> dalam pembangunan sebuah sistem informasi
Hasil Penelitian, Kesimpulan	Metode ini dapat digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pihak manajemen dalam melakukan penilaian kinerja terhadap Pramuniaga dengan menggunakan web programming. Metode ini juga dapat menghitung peringkat atau perangkingan dari kinerja Pramuniaga

Review Literatur Ketiga	
Judul Artikel	Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Dosen Menggunakan Metode Weighted Product di AMIK Parbina Nusantara [1]
Penulis	Jimmi Hendrik P. Sitorus, Rusmayani Tambun
Judul Jurnal/ Proceeding	Jurnal Bisantara Informatika (JBI) Vol.4, No.1, Juni 2020, pp. 1~14 ISSN (print): 2686-6455, ISSN (online): 2686-5319
Tahun Penerbitan	2020
Masalah Utama yang Diangkat	Masalah yang diangkat yaitu penilaian kinerja dosen secara manual sudah tidak efektif lagi sehingga perlu menerapkan sebuah metode perhitungan yang menghasilkan sebuah nilai keputusan yang bermanfaat dan mempermudah bagi pihak perguruan tinggi dalam melakukan evaluasi kinerja dosen
Kontribusi Penulis	Membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk melakukan evaluasi kinerja dosen berbasis web di AMIK PARBINA NUSANTARA

Ikhtisar Artikel	AMIK PARBINA NUSANTARA setiap akhir semester selalu mengadakan sebuah evaluasi kinerja dosen yang dinilai oleh mahasiswa dengan menggunakan kuisioner. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, maka penilaian kinerja secara manual tidak efektif lagi karena teknologi menuntut kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data dan informasi sehingga perlu menerapkan sebuah metode perhitungan yang dapat mempermudah dan bermanfaat bagi pihak perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>Weighted Product</i> yang nantinya akan menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan penilaian kinerja dosen.
Hasil Penelitian, Kesimpulan	Dengan menggunakan metode ini banyak manfaatnya untuk mengambil sebuah keputusan dengan berbagai kriteria yang ada sehingga penilaian terhadap dosen lebih bervariasi dan penilaiannya lebih spesifik dan terinci sehingga yang didapatkan hasil yang lebih akurat

Review Literatur Keempat	
Judul Artikel	Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Dengan Menggunakan Metode Topsis [17]
Penulis	Shylivia Nurul Amida, Titin Kristiana
Judul Jurnal/ Proceeding	JSAI, Volume 2 Nomor 3, November 2019 ISSN: 2614-3062; E-ISSN: 2614-3054
Tahun Penerbitan	2019

Masalah Utama yang Diangkat	Masalah yang diangkat yaitu penilaian yang masih subjektif yang berakibat ketidak seimbangan dalam mengambil penilaian keputusan sehingga mengurangi kualitas para pegawai dalam penilaian yang kurang akurat. Untuk itu perlu adanya solusi untuk menghindari permasalahan tersebut dengan salah satunya menggunakan metode TOPSIS
Kontribusi Penulis	Membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada di Kantor Pemerintahan Desa Maja Baru dengan menggunakan metode TOPSIS
Ikhtisar Artikel	Metode TOPSIS dapat membantu untuk menyelesaikan masalah pada hasil keputusan pegawai. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negative yang bertujuan untuk menentukan kedekatan relative dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Pada tempat penelitian tersebut menggunakan metode topsis dikarenakan metode tersebut cara menilainya berdasarkan kriteria-kriteria yang ada secara praktis karena konsepnya yang sederhana dan mudah dipahami.
Hasil Penelitian, Kesimpulan	Hasil penelitian sistem pendukung keputusan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan kriteria-kriteria pada Kantor Pemerintahan Desa Maja Baru.

	Sistem yang dibangun telah terkomputerisasi agar lebih mudah dalam proses penilaian kinerja pegawai.
--	--

Review Literatur Kelima	
Judul Artikel	Sistem Penilaian Kinerja untuk Peningkatan Akurasi Dalam Pemberian Kenaikan Gaji Karyawan dengan Metode 360 Degree [6]
Penulis	Indrawan, Dwi Okarina
Judul Jurnal/ Proceeding	Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer dan Informasi Vol. 4 No. 1 Thn 2022, Hal 1-7, E-ISSN : 2685-6565
Tahun Penerbitan	2022
Masalah Utama yang Diangkat	Pada tempat penelitian Penilaian kinerja karyawan yang dilakukan secara sepihak oleh masing-masing bagian sendiri menjadi penilaian yang kurang efektif maka dibutuhkannya sebuah metode yang tepat yaitu metode 360 <i>degree</i> .
Kontribusi Penulis	Melakukan penelitian dan merancang sebuah sistem informasi dengan metode 360 <i>degree</i> agar dapat mengatasi ketidak efektifan suatu kriteria penilaian terhadap karyawannya
Ikhtisar Artikel	Cara menilai dengan metode ini yaitu seorang karyawan tidak hanya dinilai dari atasan langsung, akan tetapi penilaian kinerja juga diambil dari rekan kerja satu level dan bawahan langsung dari pegawai tersebut sehingga hasil nilai keputusannya lebih akurat dari sebelumnya secara terkomputerisasi oleh

	sistem yang akan mempengaruhi kenaikan gaji karyawan.
Hasil Penelitian, Kesimpulan	Metode <i>360degree</i> dapat meningkatkan akurasi dalam melakukan penilaian terhadap karyawan pada tempat tersebut. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi dapat mempersingkat waktu kinerja dan sekaligus menambahkan keakuratan keputusan yang berakibat kenaikan gaji karyawan